



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENGUATAN KAPASITAS HULU UNTUK HILIRISASI NIKEL BERKELANJUTAN

**T. Ade Surya**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teuku.surya@dpr.go.id](mailto:teuku.surya@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Jumlah smelter nikel di Indonesia semakin banyak dan kapasitas produksinya tumbuh dengan sangat pesat. Pada tahun 2017, produksi smelter nikel hanya sekitar 250 ribu ton nikel kelas dua, namun pada tahun 2024 melonjak menjadi sekitar 1,8 juta ton nikel kelas dua dan 395 ribu ton nikel kelas satu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri baja tahan karat dan material baterai dunia dengan pangsa pasar lebih dari 60 persen kebutuhan global. Pertumbuhan pesat smelter merupakan dampak dari kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah sebagai strategi utama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mempercepat transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Namun, ekspansi smelter nikel yang masif ini menghadirkan tantangan serius karena tidak diimbangi dengan peningkatan produksi bahan baku di hulu. Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina sebanyak 10,4 juta ton untuk memenuhi pasokan bahan baku. Bahkan tahun ini diperkirakan volume impor bijih nikel meningkat menjadi 15 juta ton atau senilai US\$600 juta.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia, Arif Perdana Kusumah, menyatakan bahwa menjadi ironi ketika Indonesia harus mengimpor bijih nikel dari Filipina karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sebesar 55 juta ton logam nikel atau sekitar 45 persen cadangan dunia. Sementara Filipina hanya memiliki cadangan nikel sebesar 4,8 juta ton logam nikel atau sekitar 4 persen cadangan dunia, jauh di bawah Indonesia. Dengan cadangan sebesar itu, seharusnya Indonesia berada dalam posisi paling aman terkait ketersediaan bijih nikel. Namun, pertumbuhan kapasitas smelter nikel yang pesat ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan produksi tambang nikel. Padahal, smelter nikel dengan teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi membutuhkan pasokan yang berkelanjutan. Jika produksi tambang nikel tidak sejalan dengan laju pembangunan dan kapasitas smelter nikel maka industri nikel nasional akan menghadapi tekanan akibat krisis pasokan bahan baku yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing Indonesia di pasar global.

Upaya hilirisasi nikel harus diiringi dengan penguatan kapasitas pasokan di hulu agar rantai industri nikel nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Industri nikel merupakan ekosistem yang kompleks di mana tambang sebagai pemasok bahan baku, smelter sebagai pengolah, pasar sebagai penyerap produk, serta kebijakan pemerintah sebagai pengarah harus dapat bersinergi. Ketika satu elemen melemah, seperti pasokan bijih nikel di hulu, seluruh mata rantai industri berpotensi terganggu. Dampaknya dapat berupa ketidakpastian investasi akibat perubahan kebijakan, peningkatan biaya produksi akibat melonjaknya harga bijih, risiko penghentian operasi smelter, terhambatnya investasi lanjutan pada industri baterai dan kendaraan listrik, serta berpengaruh terhadap lembaga pembiayaan dan sektor pendukung lainnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang konkret dan terintegrasi di sektor hulu. Pemerintah perlu mengambil peran yang lebih tegas dengan fokus pada tiga hal. *Pertama*, memperkuat eksplorasi untuk memastikan cadangan nikel yang ada dapat terus

dioptimalkan dan diperbarui, karena cadangan yang tidak dieksplorasi tidak akan menghasilkan produksi. *Kedua*, meningkatkan kapasitas dan kepatuhan teknis operasional tambang agar setiap penambangan dapat berjalan efisien, aman, dan menghasilkan luaran sesuai standar industri. *Ketiga*, memberikan prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi tambang yang terintegrasi dengan smelter untuk memastikan keselarasan antara kuota produksi dengan kebutuhan aktual pasokan smelter. Pengaturan kuota harus berbasis data dan kemampuan produksi. Dengan langkah ini, kesinambungan hilirisasi nikel dapat terwujud dan Indonesia diharapkan mampu mempertahankan posisi strategisnya dalam industri nikel global.

## Atensi DPR

Pertumbuhan kapasitas smelter nikel yang pesat ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan produksi bahan baku di hulu. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor bijih nikel dari Filipina. Kondisi ini menjadi sebuah ironi mengingat Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Jika produksi tambang nikel tidak sejalan dengan laju pembangunan dan kapasitas smelter nikel maka industri nikel nasional akan menghadapi tekanan akibat krisis pasokan bahan baku. Komisi XII DPR RI perlu mengawal implementasi kebijakan hilirisasi nikel yang tidak hanya mendorong pertumbuhan industri hilir, tetapi juga mengoptimalkan kapasitas hulu melalui penguatan eksplorasi, peningkatan standar operasional penambangan, dan pemberian kuota produksi berbasis data yang terintegrasi dengan kebutuhan smelter. Komisi XII DPR RI juga perlu melakukan pengawasan ketat dan memberikan dukungan kebijakan yang konsisten agar hilirisasi nikel dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjaga daya saing industri nikel nasional dalam ekosistem industri global.

## Sumber

antaranews.com, 21 November 2025; dan  
ekonomi.bisnis.com, 20 November 2025.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*